

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2022
Bagian Anggaran 005.04

Jl. Lingkar Selatan Dukuh Jagalan RT. 14 RW. 05

Salatiga - Jawa Tengah 50731

Telp. 0298-322853/325243 Fax. 0298-322853/325243

e-mail : pa_salatiga@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Lingkar Selatan Dukuh Jagalan RT. 14 RW. 05

Telp. 0298-322853/325243 Fax. 0298-322853/325243

Salatiga - Jawa Tengah 50731

e-mail : pa_salatiga@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Salatiga adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Salatiga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Salatiga. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salatiga, 30 Juni 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SITI KHALIMAH, S.H.
NIP. 19650103 198703 2 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	14
V. Catatan atas Laporan Keuangan	16
A. Penjelasan Umum	16
A.1. Dasar Hukum	16
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Salatiga	17
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	18
A.4. Basis Akuntansi.....	18
A.5. Dasar Pengukuran	18
A.6. Kebijakan Akuntansi	19
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	27
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	27
B.2. Belanja	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
C.1. Aset Lancar	31
C.2. Aset Tetap.....	32
C.3. Aset Lainnya	34
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	34
C.5. Ekuitas	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	36

D.2.	Beban Pegawai	36
D.3.	Beban Persediaan.....	36
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	37
D.5.	Beban Pemeliharaan	38
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	38
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	38
D.8.	Beban Bantuan Sosial	39
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	39
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	39
D.11.	Beban Lain-lain	39
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	39
D.13.	Pos Luar Biasa.....	40
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	41
E.1.	Ekuitas Awal	41
E.2.	Surplus (defisit) LO	41
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan	41
E.4.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar.....	42
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	42
E.6.	Ekuitas Akhir	42
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	43
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	43
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	43
	Laporan-laporan Pendukung.....	45
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	46
	Data Pendukung Laporan Keuangan.....	48

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021.....	2
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021	3
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	25
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	26
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 Juni TA 2022.....	27
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPNP untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021	27
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022.....	28
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022	28
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021	29
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang	30
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021	31
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	31
Tabel 13 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022.....	33
Tabel 14 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021.....	35
Tabel 15 Rincian PNPB untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021	36
Tabel 16 Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021.....	37
Tabel 17 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021...	37
Tabel 18 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021 .	38
Tabel 19 Rincian Koreksi Nilai Persediaan	41

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Salatiga

Jl. Lingkar Selatan Dukuh Jagalan RT. 14 RW. 05 Salatiga - Jawa Tengah 50731

Telp. 0298-322853 Fax. 0298-325243 e-mail : pa_salatiga@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Salatiga yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Salatiga telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Salatiga, 30 Juni 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SITI KHALIMAH, S.H.
NIP. 19650103 198703 2 002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Salatiga Periode 30 Juni Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp20.448.000,00 atau mencapai 14,50 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp141.059.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp37.945.882,00 atau mencapai 48,91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp77.580.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran
Pendapatan Negara	141.059.000	20.448.000	14,50	125.900.000	31.414.500	24,95
Belanja Negara	77.580.000	37.945.882	48,91	33.500.000	18.029.600	72,86

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.998.823,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp14.998.823,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya per 30 Juni 2022 tersaji sebesar Rp800.000,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp800.000,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00.

Nilai Ekuitas per 30 Juni 2022 disajikan sebesar Rp14.998.823,00.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	14.998.823	14.945.887	52.936	0,35
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	14.998.823	14.945.887	52.936	0,35
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	800.000	0	800.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	800.000	0	800.000	0,00
Ekuitas				
Ekuitas	14.198.823	14.945.887	(747.064)	(5,00)
Jumlah Ekuitas Dana	14.198.823	14.945.887	(747.064)	(5,00)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	14.998.823	14.945.887	52.936	0,35

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp20.448.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp38.692.946,00 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp18.244.946,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar (Rp18.244.946,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp14.945.887,00 ditambah surplus(defisit)-LO sebesar (Rp18.244.946,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp17.497.882,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp14.198.823,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA SALATIGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TA 2022 DAN TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021		
			Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1						
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	141.059.000	20.448.000	14,50	125.900.000	31.414.500	24,95
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		141.059.000	20.448.000	14,50	125.900.000	31.414.500	24,95
B.	Belanja Negara	B.2						
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0	0	0,00
2.	Belanja Barang	B.2.2.	77.580.000	37.945.882	48,91	33.500.000	18.029.600	53,82
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0	0	0,00
	Jumlah Belanja Negara		77.580.000	37.945.882	48,91	33.500.000	18.029.600	0,00

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA SALATIGA
NERACA
PER 30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1.		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	800.000	0
Persediaan	C.1. 2.	14.198.823	14.945.887
Jumlah Aset Lancar		14.998.823	14.945.887
Aset Tetap	C.2.		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya	C.3.	0	0
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		14.998.823	14.945.887
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4.		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.4. 2.	800.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		800.000	0
Jumlah Kewajiban		800.000	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.5.		
Jumlah Ekuitas		14.198.823	14.945.887
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.998.823	14.945.887

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SALATIGA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TA 2022 DAN TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	20.448.000	31.414.500
Jumlah Pendapatan		20.448.000	31.414.500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	1.147.064	893.464
Beban Barang dan Jasa	D. 4	18.161.882	18.029.600
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	19.384.000	0
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		38.692.946	18.923.064
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(18.244.946)	12.491.436
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus /Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus /Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(18.244.946)	12.491.436

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SALATIGA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TA 2022 DAN TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Ekuitas Awal	E. 1	14.945.887	14.747.700
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(18.244.946)	12.491.436
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		0	0
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Penyesuaian Nilai Kewajiban		0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	17.497.882	(13.384.900)
Kenaikan /Penurunan Ekuitas		(747.064)	(893.464)
Ekuitas Akhir		14.198.823	13.854.236

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Salatiga

Visi Pengadilan Agama Salatiga adalah adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SALATIGA YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Agama Salatiga adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima berbasis Teknologi Informasi (TI);
2. Meningkatkan kualitas Aparatur yang professional;
3. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Salatiga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap indenpendensi Pengadilan dan proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Salatiga.
2. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (*client service*) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.
3. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.
5. Meningkatkan kepuasan pencari keadilan terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Salatiga.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 30 Juni Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Salatiga adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber

daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam

waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah:
Rp20.448.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp20.448.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Penitera Badan	0	0	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	46.965.000	6.250.000	13,31
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	94.094.000	14.198.000	15,09
Total Pendapatan		141.059.000	20.448.000	15,50

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp10.966.500,00) atau 34,91 persen dibandingkan untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2021 yang mencapai Rp31.414.500,00. Hal ini disebabkan karena:

1. Berkurangnya pendapatan uang meja (leges) dan upah pada penitera badan
2. Berkurangnya pendapatan ongkos perkara.
3. Berkurangnya pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Perbandingan realisasi PNBP untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Penitera Badan	0	10.000	10.000	0,00

2.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.250.000	7.650.000	(1.400.000)	(18,30)
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	14.198.000	23.754.500	(9.556.500)	(40,23)
	Total Pendapatan	20.448.000	31.414.500	(10.966.500)	(34,91)

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara:
Rp37.945.882*

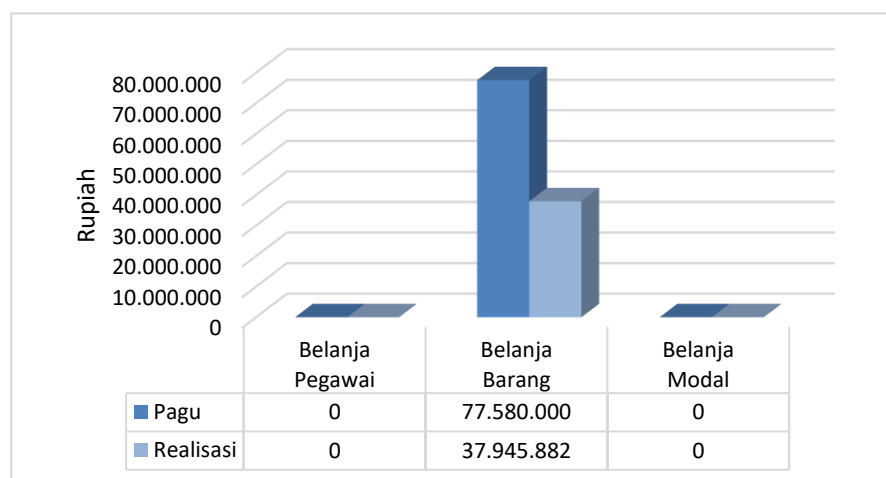
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Salatiga untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp37.945.882,00 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 48,91 persen dari anggaran senilai Rp77.580.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	77.580.000	37.945.882	48,91
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	77.580.000	37.945.882	48,91
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Neto	77.580.000	37.945.882	48,91

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual Semester I Tahun 2022

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp19.916.282,00 atau sebesar 110,46 persen dari realisasi belanja negara untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 yang mencapai Rp18.029.600,00. Hal ini disebabkan karena bertambahnya realisasi belanja barang.

Perbandingan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	37.945.882	18.029.600	19.916.282	110,46
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	37.945.882	18.029.600	19.916.282	110,46

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai: Rp0*

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Salatiga Bagian Anggaran DIPA 04 tidak memiliki alokasi Belanja Pegawai.

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang:
Rp37.945.882*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Salatiga per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp37.945.882,00 dan Rp18.029.600,00.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 110,46 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Bertambahnya realisasi belanja bahan
2. Bertambahnya realisasi belanja perjalanan dinas biasa
3. Bertambahnya realisasi belanja barang persediaan
4. Bertambahnya realisasi belanja perjalanan dinas dalam kota
5. Bertambahnya realisasi belanja jasa

Rincian Realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang
untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional				
Belanja Honor Output Kegiatan	0	300.000	(300.000)	0,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	3.500.000	(3.500.000)	0,00
Belanja Bahan	1.150.000	0	1.150.000	0,00
Total Belanja Barang Non Operasional	1.150.000	3.800.000	(2.650.000)	(69,74)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.184.000	0	17.184.000	0,00
Belanja Barang Persediaan	400.000	0	400.000	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.200.000	0	2.200.000	0,00
Belanja Jasa				
Belanja Jasa Konsultan	17.011.882	14.229.600	2.782.282	19,55
Total Belanja Jasa	17.011.882	14.229.600	2.782.282	19,55
Total Belanja Bruto	37.945.882	18.029.600	19.916.282	110,46
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Neto	37.945.882	18.029.600	19.916.282	110,46

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal:
Rp0*

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Salatiga Bagian Anggaran DIPA 04 tidak memiliki alokasi Belanja Modal.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:
Rp14.998.823*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.998.823,00 dan Rp14.945.887,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Salatiga per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	800.000	0
Persediaan	14.198.823	14.945.887
Total Aset Lancar	14.998.823	14.945.887

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran:
Rp800.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp800.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2022	31 Desember 2021
1.	Kuitansi UP	0	0
2.	Uang Tunai di Brankas	800.000	0
	Jumlah	800.000	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp14.198.823*

Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp14.198.823,00 dan Rp14.945.887,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap: Rp0

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin: Rp0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan: Rp0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan, Irigasi,
dan Jaringan: Rp0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan: Rp0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap:0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 13 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.3. Aset Lainnya

*Aset Lainnya:
Rp0* Nilai Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud: Rp0 Saldo aset tak berwujud per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan barang milik negara (BMN) yang berupa software antivirus.

C.3.2. Aset Lain-Lain

*Aset Lain-lain:
Rp0* Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Salatiga serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi Aset Lainnya: Rp0* Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek:
Rp800.000* Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp800.000,00 dan Rp0,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Salatiga per 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 14 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari KPPN	800.000	0
Jumlah	800.000	0

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp0*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp800.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp800.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp14.198.823*

Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.198.823,00 dan Rp14.945.887,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP:
Rp20.448.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp20.448.000 dan Rp31.414.500,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 15 Rincian PNPB untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	10.000	(10.000)	(100,00)
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.250.000	7.650.000	(1.400.000)	(18,30)
3.	Pendapatan kejaksaan dan Peradilan Lainnya	14.198.000	23.754.500	(9.556.500)	(40,23)
Total Pendapatan		20.448.000	31.414.500	(10.966.500)	(34,91)

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai:
Rp0*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan:
Rp1.147.064*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.147.064,00 dan Rp893.464,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak

dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.147.064	893.464	253.600	28,38
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0,00
Total Beban Persediaan	1.147.064	893.464	253.600	28,38

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa:
Rp18.161.882*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp18.161.882,00 dan Rp18.029.600,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Beban Honor Output Kegiatan	0	300.000	(300.000)	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	3.500.000	(3.500.000)	(100,00)
Beban Bahan	1.150.000	0	1.150.000	0,00
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	-0	0,00
Beban Jasa Konsultan	17.011.882	14.229.600	2.782.282	19,55
Total Beban Barang dan Jasa	18.161.882	18.029.600	132.282	0,73

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas: Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.384.000,00 dan Rp0,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.584.000	0	17.584.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	1.800.000	0	1.800.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0,00
Total Beban Perjalanan Dinas	19.384.000	0	19.384.000	0,00

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat: Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial: Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi: Rp0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih: Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain: Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional: Rp0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Jumlah Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa: Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal: Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.945.887,00 dan Rp14.747.700,00.
Rp14.945.887

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO: Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar (Rp18.244.946,00) dan Rp12.491.436,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
(Rp18.244.946)

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan: Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:
Rp0

**Tabel 19 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar

Koreksi Aset Tetap: Rp0 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas: Rp17.497.882 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.497.882,00 dan (Rp13.384.900,00).

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir: Rp14.198.823 Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.198.823,00 dan Rp13.854.236,00.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat Informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada periode 30 Juni 2022.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Salatiga adalah:

1. BRI Cabang Salatiga A/C 651544009211000 a.n. BPG 134 PENGADILAN AGAMA SALATIGA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.
2. BRI Cabang Salatiga A/C 0081-01-00699-30-8 a.n. RPL 134 PENGADILAN AGAMA SALATIGA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp8.396.000,00.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA ke 01 tanggal 11 April 2022, yaitu Revisi Administrasi, Perubahan Rencana Penarikan pada Lembar ke III DIPA.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada Semester I tahun 2022 tidak terdapat ralat SPM, SSBP, SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting lainnya pada laporan keuangan periode 30 Juni 2022 ini.

LAPORAN PENDUKUNG

*RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Salatiga
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
Per 30 Juni 2022

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A. Peralatan dan Mesin					
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0
2.	Alat Ukur	0	0	0	0
3.	Alat Kantor	0	0	0	0
4.	Alat Rumah Tangga	0	0	0	0
5.	Alat Studio	0	0	0	0
6.	Alat Komunikasi	0	0	0	0
7.	Alat Kedokteran	0	0	0	0
8.	Unit Alat Laboratorium	0	0	0	0
9.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	0	0	0	0
10.	Komputer Unit	0	0	0	0
11.	Peralatan Komputer	0	0	0	0
B. Gedung dan Bangunan					
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0	0	0
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
1.	Jaringan Listrik	0	0	0	0
D. Aset Tetap Lainnya					
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	0	0	0	0
E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan					
1.	Alat Kantor	0	0	0	0
2.	Alat Rumah Tangga	0	0	0	0
3.	Alat Studio	0	0	0	0
4.	Komputer Unit	0	0	0	0
5.	Peralatan Komputer	0	0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				0	
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya				0	

*DATA PENDUKUNG LAPORAN
KEUANGAN*

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRASS
 Tanggal : 25-07-2022
 Halaman : 1
 Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH PROVINSI : 0300 Kantor Daerah
 SATUAN KERJA : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS DI (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	141,059,000	20,448,000	(120,611,000)	14,50
A.I.1	Penerimaan Dalam Negeri	141,059,000	20,448,000	(120,611,000)	14,50
A.I.1.a	Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
A.I.1.b	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	141,059,000	20,448,000	(120,611,000)	14,50
A.I.2	Hibah	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	141,059,000	20,448,000	(120,611,000)	14,50
B	BELANJA NEGARA				
B.I	BELANJA TRANSAKSI	77,580,000	37,945,882	(39,634,118)	48,91
B.I.1	Rupiah Murni	77,580,000	37,945,882	(39,634,118)	48,91
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.I.1.b	Belanja Barang	77,580,000	37,945,882	(39,634,118)	48,91
B.I.1.c	Belanja Modal	0	0	0	-
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	-
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	77,580,000	37,945,882	(39,634,118)	48,91
C	PEMBIAYAAN				
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	-
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	-
C.II.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02

Tanggal : 26-07-2022

Halaman : 1

Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH PROVINSI : 0300 Kantor Daerah
 SATUAN KERJA : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	KAS						
I	PENERIMAAN DALAM NEGERI						
4	PENDAPATAN NEGARA						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA						
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM						
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi						
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	46,965,000	1,320,000	6,250,000	0	6,250,000	13.31
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	94,094,000	2,522,500	14,198,000	0	14,198,000	15.09
	Jumlah Penerimaan 42523	141,059,000	3,842,500	20,448,000	0	20,448,000	14.50
	Jumlah Penerimaan 4252	141,059,000	3,842,500	20,448,000	0	20,448,000	14.50
	Jumlah Penerimaan 425	141,059,000	3,842,500	20,448,000	0	20,448,000	14.50
	Jumlah Penerimaan 42	141,059,000	3,842,500	20,448,000	0	20,448,000	14.50
	Jumlah Penerimaan 4	141,059,000	3,842,500	20,448,000	0	20,448,000	14.50
	JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI	141,059,000	3,842,500	20,448,000	0	20,448,000	14.50
	JUMLAH PENERIMAAN KAS	141,059,000	3,842,500	20,448,000	0	20,448,000	14.50
	JUMLAH PENERIMAAN KAS DAN NON KAS	141,059,000	3,842,500	20,448,000	0	20,448,000	14.50

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)**

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 26-07-2022
Halaman : 2
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON 1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 0300 Kantor Daerah
SATUAN KERJA : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5211	Belanja Barang Operasional								
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	175,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Operasional	175,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	525,000	500,000	0	400,000	0	400,000	80.00	100,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Persediaan	525,000	500,000	0	400,000	0	400,000	80.00	100,000
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,800,000	3,000,000	800,000	2,200,000	0	2,200,000	73.33	800,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,800,000	3,000,000	800,000	2,200,000	0	2,200,000	73.33	800,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	3,500,000	3,500,000	800,000	2,600,000	0	2,600,000	74.29	900,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1053.QCA	3,500,000	3,500,000	800,000	2,600,000	0	2,600,000	74.29	900,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1053	39,860,000	39,860,000	4,154,456	19,611,882	0	19,611,882	49.20	20,248,118
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.BF	39,860,000	39,860,000	4,154,456	19,611,882	0	19,611,882	49.20	20,248,118
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 03.04	39,860,000	39,860,000	4,154,456	19,611,882	0	19,611,882	49.20	20,248,118

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)**

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 26-07-2022
Halaman : 3
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON 1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 0300 Kantor Daerah
SATUAN KERJA : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	39,860,000	39,860,000	4,154,456	19,611,882	0	19,611,882	49.20	20,248,118
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	39,860,000	39,860,000	4,154,456	19,611,882	0	19,611,882	49.20	20,248,118
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA A	39,860,000	39,860,000	4,154,456	19,611,882	0	19,611,882	49.20	20,248,118
D	PNBP								
0	RM								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
04	PERADILAN								
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								
AEA	Koordinasi								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	4,120,000	4,120,000	625,000	1,150,000	0	1,150,000	27.91	2,970,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	4,120,000	4,120,000	625,000	1,150,000	0	1,150,000	27.91	2,970,000
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,600,000	33,600,000	10,486,000	17,184,000	0	17,184,000	51.14	16,416,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)**

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 26-07-2022
Halaman : 4
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON 1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 0300 Kantor Daerah
SATUAN KERJA : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33,600,000	33,600,000	10,486,000	17,184,000	0	17,184,000	51.14	16,416,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	37,720,000	37,720,000	11,111,000	18,334,000	0	18,334,000	48.61	19,386,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1053.AEA	37,720,000	37,720,000	11,111,000	18,334,000	0	18,334,000	48.61	19,386,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1053	37,720,000	37,720,000	11,111,000	18,334,000	0	18,334,000	48.61	19,386,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.BF	37,720,000	37,720,000	11,111,000	18,334,000	0	18,334,000	48.61	19,386,000
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 03.04	37,720,000	37,720,000	11,111,000	18,334,000	0	18,334,000	48.61	19,386,000
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	37,720,000	37,720,000	11,111,000	18,334,000	0	18,334,000	48.61	19,386,000
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	37,720,000	37,720,000	11,111,000	18,334,000	0	18,334,000	48.61	19,386,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA D	37,720,000	37,720,000	11,111,000	18,334,000	0	18,334,000	48.61	19,386,000
	JUMLAH BELANJA TRANSAKSI KAS	77,580,000	77,580,000	15,265,456	37,945,882	0	37,945,882	48.91	39,634,118

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 30 JUNI 2022

Kode Lap : NPSAIKS
Tanggal : 26-07-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON 1 :04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI :0300 Kantor Daerah
SATUAN KERJA :400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	800,000	0
2	117111	Barang Konsumsi	14,198,823	0
2	219511	Uang Muka dari KPPN	0	800,000
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	37,945,882
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	20,448,000	0
2	391111	Ekuitas	0	14,945,887
2	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	6,250,000
2	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	14,198,000
2	521211	Beban Bahan	1,150,000	0
2	522131	Beban Jasa Konsultan	17,011,882	0
2	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	17,584,000	0
2	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0
2	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,147,064	0
JUMLAH			74,139,769	74,139,769

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO

Tanggal : 26-07-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : 0300 Kantor Daerah
 SATUAN KERJA : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	2022
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Pendapatan Cukai	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0
Pendapatan Bea Masuk	0
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	20,448,000
425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0
425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	14,198,000
425233 Pendapatan Ongkos Perkara	6,250,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	20,448,000
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	20,448,000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	0
Beban Persediaan	1,147,064
593111 Beban Persediaan konsumsi	1,147,064
Beban Barang dan Jasa	18,161,882
521211 Beban Bahan	1,150,000
521811 Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0
522131 Beban Jasa Konsultan	17,011,882
Beban Pemeliharaan	0
Beban Perjalanan Dinas	19,384,000
524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa	17,584,000
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
Beban Bunga	0
Beban Subsidi	0
Beban Hibah	0

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
 Tanggal : 26-07-2022
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : 0300 Kantor Daerah
 SATUAN KERJA : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2022
1		2
Beban Bantuan Sosial		0
Beban Penyusutan dan Amortisasi		0
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih		0
Beban Transfer		0
Beban Lain-Lain		0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)		38,692,946
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)		(18,244,946)
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
521211	Beban Bahan	
593111	Beban Persediaan konsumsi	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	
522131	Beban Jasa Konsultan	
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0
	Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
	Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		
	Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
	Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
	Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)		0
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)		(18,244,946)
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
521211	Beban Bahan	
593111	Beban Persediaan konsumsi	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	
522131	Beban Jasa Konsultan	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
Tanggal : 26-07-2022
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON 1 :04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI :0300 Kantor Daerah
SATUAN KERJA :400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	2022
1	2
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	0
Beban Luar Biasa	0
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	0
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	(18,244,946)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30-JUN-2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : TINGKAT SATKER

Tanggal : 25-07-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH PROVINSI : 0300 Kantor Daerah
 SATUAN KERJA : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	Uraian	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		30-JUN-2022	30 JUNI 2021	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	EKUITAS AWAL	14,945,887	0	14,945,887	-
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	(18,244,946)	0	(18,244,946)	-
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN	0	0	0	-
3.a	Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
3.b	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
3.c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	-
3.d	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
3.e	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	-
3.f	Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	17,497,882	0	17,497,882	-
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(747,064)	0	(747,064)	-
6	EKUITAS AKHIR	14,198,823	0	14,198,823	-

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB
Tanggal : 25-07-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON 1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 0300 Kantor Daerah
SATUAN KERJA : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	800,000
Persediaan	14,198,823
Jumlah ASET LANCAR	14,998,823
Jumlah ASET	14,998,823
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	800,000
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	800,000
Jumlah KEWAJIBAN	800,000
EKUITAS	
EKUITAS	
EKUITAS	14,198,823
Jumlah EKUITAS	14,198,823
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14,998,823

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)

DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA (04)

PENGADILAN AGAMA SALATIGA (400921)

Rekening Induk : RKK DITJEN BADILAG O (032901004361303)

Virtual Account : 651544009211000 | BPG 134 PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Periode : 01-06-2022 s/d 30-06-2022

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-06-13	14:11:41	6390500	Penyediaan Uang Persediaan PENGADILAN AGAMA SALATIGA Tahun Anggaran 2022. 221341301009070000001	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	SPAN	
2022-06-13	14:16:35	6390892	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang. 221341301009073000001	400.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	SPAN	
2022-06-15	09:10:50	6421775	PENARIKAN OLEH RIA HAKIMA SURYA	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	TELLER_CARD	
2022-06-15	09:11:41	6421797	PENARIKAN OLEH RIA HAKIMA SURYA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2022-06-21	12:43:15	6502788	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang. 221341301009870000001	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	SPAN	
2022-06-21	12:43:37	6502859	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang. 221341301009874000001	400.000,00	0,00	225.000,00	625.000,00	SPAN	
2022-06-23	09:57:16	6533073	PENARIKAN OLEH RIA HAKIMA SURYA	625.000,00	400.000,00	0,00	225.000,00	TELLER_CARD	
2022-06-23	09:58:04	6533108	PENARIKAN OLEH RIA HAKIMA SURYA	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2022-06-29	11:18:08	6614426	Pembayaran Belanja Barang berupa Biaya Perjalanan Dinas sesuai SPD Nomor: W11-A13/1265/KU.01/6/2022 221341301010560000001	0,00	0,00	10.486.000,00	10.486.000,00	SPAN	
2022-06-29	11:18:08	6614427	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang. 221341301010561000001	10.486.000,00	0,00	400.000,00	10.886.000,00	SPAN	
2022-06-30	08:23:36	6628291	PENARIKAN OLEH RIA HAKIMA SURYA	10.886.000,00	10.486.000,00	0,00	400.000,00	TELLER_CARD	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-06-30	08:24:23	6628295	PENARIKAN OLEH RIA HAKIMA SURYA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		12.311.000,00	12.311.000,00			
			Saldo Akhir				0,00		



005

04

0300

400921

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2022